

DEMOKRASI PANCASILA : KONSEP DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Miftahul Rohim, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, & Saepul Rizki
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Abstrak:

Demokrasi menawarkan wawasan bahwa sumber daya memahami orang dan orang membuat aturan untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Untuk itu, diperlukan basis pendukung dan landasan penghidupan untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan-aturan ini disebut konstitusi. Karena kekuasaan tertinggi itu sendiri ada di tangan rakyat, tidak perlu dipahami sebagai unilateral dan absolut dalam arti kata yang tak terbatas. Inilah yang disebut kontrak sosial antara warga sosial dan juga tercermin dalam Konstitusi. Ini adalah konstitusi yang membatasi dan mengatur cara di mana kedaulatan rakyat ditentukan, dilaksanakan dan dikelola dalam kegiatan sehari-hari negara dan pemerintahan. Pada hakekatnya, konsep kedaulatan rakyat mensyaratkan jaminan bahwa rakyat adalah pemilik negara yang sebenarnya dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Anda memiliki wewenang untuk merencanakan, mengatur, mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi penerapan fitur-fitur terkait tersebut. Dalam konteks demokrasi pancasila, penerapan prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi aktif warga negara, persatuan dalam keberagaman, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, segala kegiatan untuk kepentingan rakyat ditujukan untuk memperoleh segala manfaat yang timbul dari adanya dan berjalannya kegiatan negara. Selain itu, untuk kepentingan rakyat, semua kegiatan ditujukan untuk mencapai semua manfaat yang sudah diperoleh dari keberadaan dan berfungsinya kegiatan negara. Ini adalah konsep kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilengkapi oleh rakyat, oleh rakyat, oleh rakyat, dan dengan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi dan Pancasila

Abstract:

Democracy offers the insight that resources understand people and people make rules to protect their rights and interests. For this, there is a need for a supporting base and livelihood foundation to guarantee and protect the rights of the people. These rules are called constitutions. Since the supreme power itself is in the hands of the people, it need not be understood as unilateral and absolute in the infinite sense of the word. This is the so-called social contract between social citizens and is also reflected in the Constitution. It is the constitution that limits and regulates the manner in which the sovereignty of the people is determined, exercised and administered in the day-to-day activities of the state and government. In essence, the concept of

popular sovereignty entails the assurance that the people are the true owners of the country and have full authority to exercise all functions of state power in the legislative, executive and judicial spheres. You have the authority to plan, organize, implement, monitor and evaluate the implementation of these related features. In the context of Pancasila democracy, the application of these principles includes active citizen participation, unity in diversity, social justice and protection of human rights. In addition, all activities for the benefit of the people are aimed at achieving all the benefits that have arisen from the existence and functioning of state activities. This is the concept of popular sovereignty or democracy completed by the people, of the people, for the people, and with the people.

Keywords: Democracy, Constitution and Pancasila

PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat, yang dikenal sebagai demokrasi, diakui dalam konstitusi banyak negara. Namun, setiap negara memiliki sistem atau mekanisme sendiri yang mengikuti prinsip ini. Menurut Pasal 1 UUD 1945, UUD 1945 adalah hukum tertinggi yang mengatur hukum negara, sehingga perhatian harus diberikan pada lahirnya kedaulatan nasional berdasarkan UUD. Dengan demikian, Konstitusi ditulis dalam undang-undang afirmatif. Menurut UUD 1945, ketika asas kedaulatan negara diterapkan, rujukan pertama harus berupa hukum positif, yaitu penafsiran pasal ini harus merupakan penafsiran komprehensif berdasarkan hukum positif saat ini (dalam hal ini, UUD 1945 itu sendiri). Penafsiran parsial sebenarnya dapat menyebabkan kurangnya rasa hormat terhadap prinsip dan sistem hukum dan administrasi yang dikembangkan secara demokratis. Menurut ketentuan UUD 1945, prinsip kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap yakni pelaksanaan langsung oleh rakyat dan pelaksanaan tidak langsung oleh badan perwakilan rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode desk and literary research, yaitu kegiatan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari majalah, artikel, publikasi, dan buku serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data adalah dengan mencari referensi tentang subjek penelitian di internet dari berbagai buku, jurnal, dan artikel penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah negara di mana keunggulan sistem pemerintahan ada di tangan rakyat, dalam keputusan kolektif rakyat, dalam otoritas tertinggi, dalam kekuasaan rakyat, dalam pemerintahan rakyat, oleh rakyat. Demokrasi sebagai dasar kehidupan sosial dan negara melibatkan pemahaman bahwa rakyatlah yang membuat penilaian atas hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk evaluasi kebijakan negara.

Konsep Demokrasi

Ini adalah konsep dasar dari filosofi negara tentang demokrasi.

1. Ideologi Demokrasi Liberal

Filosofi negara menyatakan bahwa manusia adalah individu yang bebas, yang merupakan dasar dari sistem demokrasi liberal. Oleh karena itu, konsep kebebasan individu digunakan sebagai dasar dari praktik demokrasi dalam demokrasi liberal.

2. Sistem Demokrasi Komunis.

Menurut nilai-nilai sosial, dasar demokrasi ini adalah bahwa negara harus memiliki monopoli atas semua aspek kehidupan.

3. Sistem Demokrasi Pancasila

Identitas nasional Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, dan perspektif historis Indonesia adalah dasar konsep dasar demokrasi dalam konteksnya.

Prinsip – Prinsip Demokrasi

1. Aturan hukum

Demokrasi menjunjung tinggi supremasi hukum, artinya hukum berlaku sama untuk semua warga negara, termasuk mereka yang berkuasa.

2. Keterlibatan Sipil

Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan terpilih mereka.

3. Persamaan hak

Demokrasi memastikan bahwa warga negara yang berpartisipasi dalam administrasi negara menikmati hak-hak dasar dan kebebasan yang sama, dan memastikan bahwa tidak ada yang berpartisipasi dalam administrasi negara atau dikecualikan dari akses ke jabatan publik terpilih atau lainnya.

4. Aturan mayoritas dengan hak-hak minoritas

Demokrasi memungkinkan ekspresi preferensi politik warga suatu negara, tetapi memastikan bahwa hak-hak minoritas dilindungi dan tidak dianiaya oleh mayoritas.

Landasan Demokrasi Di Indonesia

Ideologi nasional Indonesia, Pancasila, berfungsi sebagai dasar demokrasi Indonesia. Karena rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, Indonesia berkomitmen pada demokrasi Pancasila. Dari kesulitan-kesulitan yang muncul selama pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, kini telah dicapai kemajuan dan mulai berkembang dengan baik. Selain itu, penerapan demokrasi yang kuat sangat penting untuk kehidupan negara yang baik, karena demokrasi mencegah penguasa menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk merebut atau mempertahankannya. Akibatnya, pendidikan politik dan demokrasi kerakyatan penting untuk mempercepat transisi demokrasi.

Partisipasi Politik

Keterlibatan masyarakat adalah aspek penting dari demokrasi di Indonesia.

1. Pemilu

Pemilu adalah aspek penting dari demokrasi, dan di Indonesia, warga negara berpartisipasi dalam proses pemilihan untuk memilih pemimpin dan perwakilan.

2. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai sistem demokrasi di Indonesia.

3. Media (partai politik)

Partai politik adalah kerangka institusional untuk proses representasi dan pemerintahan di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk membangun sistem komunikasi dan mengumpulkan aspirasi publik dalam forum konsultasi publik.

4. Anti-korupsi

Korupsi adalah ancaman bagi demokrasi dan pemerintahan yang baik.

5. Tantangan

Terlepas dari upaya untuk mempromosikan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, Indonesia terus menghadapi tantangan seperti hambatan politik dan ideologis, degradasi moral, dan politik moneter.

Penerapan Sistem Demokrasi Di Indonesia

Indonesia telah mengalami empat perkembangan demokrasi: era demokrasi parlementer, era demokrasi langsung, era demokrasi Pancasila di era orde baru, dan era demokrasi Pankashiya di era reformasi. Periode demokrasi parlementer adalah periode pertama kemerdekaan Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Kemudian, Indonesia mengadopsi demokrasi judo selama era Sukarno, dari tahun 1959 hingga 1966. Apalagi, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila di era orde baru pada masa pemerintahan Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Akhirnya, setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila di era reformasi. Selama reformasi, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi dengan kekuatan terbesar di tangan rakyat.

Demokrasi telah menjadi pilihan politik, dianggap sebagai salah satu bentuk pemerintahan politik terbaik untuk memerintah negara secara efektif, tetapi praktik kehidupan demokrasi masih menyaksikan pasang surut dengan dinamika perkembangan politik, yang masih dalam proses menentukan bentuk politik yang ideal.

Indonesia telah mewujudkan bentuk demokrasiya sendiri, sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam konteks transisi politik di mana tindakan politik negara dan rakyatnya telah menunjukkan kematangan yang berbeda.

Tantangan dan Solusi Praktik Demokrasi

Ada banyak tantangan terhadap praktik demokrasi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah:

1.Hambatan politik dan ideologis

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia menghadapi hambatan politik dan ideologis terhadap pencapaian demokrasi substantif.

2.Kurangnya pendidikan politik

Pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal dilakukan, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, khususnya partisipasi pemuda dalam berpolitik.

3.Politik uang

Politik uang adalah praktik umum di Indonesia dan merupakan ancaman bagi demokrasi dan pemerintahan yang baik. Hal ini dapat menyebabkan korupsi dan masalah lain yang dapat menghambat proses demokratisasi.

4.Dinasti politik

Dinasti politik adalah fenomena di mana dinasti politik tumbuh di Indonesia dan persaingan politik semakin ketat. Hal ini dapat menyebabkan distribusi kekuasaan politik yang tidak merata dan membatasi partisipasi kandidat yang memenuhi syarat yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan mereka yang berkuasa.

5.Solusi

Ini membutuhkan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu meningkatkan pelaksanaan pendidikan politik dan memerangi politik uang. Partai politik harus bekerja lebih keras untuk membangun sistem komunikasi dan menghimpun aspirasi masyarakat dalam forum konsultasi publik. Masyarakat sipil dapat berperan dalam mengawasi dan mengawasi kekuasaan politik cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Konsep Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang menganut nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan memandang kehidupan bangsa Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain itu, demokrasi pancasila memiliki prinsip dan karakteristik utama demokrasi. Prinsip-prinsip dasar kehidupan demokrasi di Indonesia tertuang dalam ayat 4 Pancasila, yang berperan penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam perjalanan implementasinya, demokrasi Pancasila Indonesia mengalami pasang surut, namun kini telah mengalami perubahan dan mulai berkembang dengan baik. Demokrasi di Pancasila juga sangat penting karena membawa kehidupan yang baik bagi negara. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan mengimplementasikan kehadiran Pancasila sebagai upaya membangkitkan kesadaran nasional di era globalisasi.

Nilai – Nilai Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi di mana kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat, baik itu administrasi negara atau administrasi pemerintahan. Dalam demokrasi rakyat, rakyat memainkan peran penting dalam menentukan politik nasional. Nilai-nilai demokrasi rakyat meliputi kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih, keadilan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia, kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan rakyat dan didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila diperlukan agar dapat menjalani kehidupan yang baik di tanah air. Demokrasi Pancasila masih dalam tahap perkembangannya, dan meskipun terdapat perbedaan tafsir dan pendapat tentang karakteristik dan karakteristiknya, beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional jelas terkandung dalam UUD 1945.

KESIMPULAN

Demokrasi adalah sistem politik yang kompleks dengan prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi publik, kebebasan berekspresi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi adalah proses yang terus berkembang sesuai dengan tantangan dan kendala tertentu. Namun, demokrasi masih dipandang sebagai sistem yang lebih mementingkan kebebasan individu dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Indonesia telah melalui beberapa tahapan dan perkembangan, dari era demokrasi administratif hingga demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Demokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala politik an ideologis, tetapi tetap merupakan pilihan politik, dianggap sebagai salah satu sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, upaya membangun demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan dengan mengedepankan budaya dan struktur demokrasi. Salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah menerapkan konsep moderasi Islam sebagai titik awal untuk membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangan demokrasi, Indonesia juga harus memperhatikan nilai-nilai demokrasi rakyat, seperti kebebasan berpendapat, hak memilih, hak dipilih, keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BIBLIOGRAFI

- S. A. V. Putri, "Demokrasi= pemerintahan Berlandaskan pancasila atau demokrasi pancasila," 2021.
- M. Ende, "DEMOKRASI," 2021.
- S. Suriah, "Penerapan sistem demokrasi di Indonesia," 2021.
- Y. Syahrani, "MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI," 2021.
- Z. Djumadin, "Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2022.

- P. Kutikasari, "PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA," 2018.
- D. Purniawati, "Perkembangan Demokrasi Yang Diterapkan Di Indonesia," 2021.
- S. E. Wurihandayani, "PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SUSUNAN KETATANEGARAAN INDONESIA," 2021.
- Y. Namira, "DINAMIKA SERTA PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA," 2022.
- A. N. Hidayanti, "Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Sebagai Upaya Memupuk Rasa Nasionalisme Bangsa di Era Globalisasi," 2021.
- M. O. C. Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijakan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021.
- S. A. V. Putri, "Demokrasi= pemerintahan Berlandaskan pancasila atau demokrasi pancasila," 2021.
- R. C. Setyawan, "Demokrasi," 2021.
- O. keo, "Demokrasi dan pembangunan kesehatan," 2021.
- M. Panjaitan, "Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara," 2015.
- I. Djumat, "KEMAPANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA (Antara Demokrasi Islam Versus Demokrasi Barat) (Review)," *Jurnal Geocivic*, 2019.
- S. A. V. Putri, "Demokrasi= pemerintahan Berlandaskan pancasila atau demokrasi pancasila," 2021.
- Y. Syahrani, "MAKNA DAN HAKIKAT DEMOKRASI," 2021.
- M. Marzuki, "Moderasi Islam Sebagai Pintu Demokrasi Keberagaman di Indonesia," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 2022.
- D. Purniawati, "Perkembangan Demokrasi Yang Diterapkan Di Indonesia," 2021.
- Z. Djumadin, "Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2022.
- S. Suparno dan K. Karmanis, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI DI KOTA SEMARANG," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 2020.
- A. M. Holish, R. Rohmat, dan I. Syarifudin, "Money Politic dalam Praktik Demokrasi Indonesia," 2018.
- Z. Djumadin, "Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi," *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2022.

- S. E. Wurihandayani, "PENERAPAN DEMOKRASI DALAM SUSUNAN KETATANEGARAAN INDONESIA," 2021.
- J. Chovancová, "Philosophy of democracy and Principles of Democracy," *Progress in Economic Sciences*, hlm. 41–51, 2016.
- S. Suparno dan K. Karmanis, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI DI KOTA SEMARANG," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 2020.
- L. Lisma dan L. T. A.L.W, "IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015)," 2017.
- E. Partai, P. dan, D. M. Bangsa, dan I. Mahmud, "cita, pandangan, ide, gagasannya tersebut dengan menempatkan pemimpin- pemimpin dalam pemerintahan dan jabatan-jabatan publik melalui pemilu. Dalam praktik demokrasi peran dan fungsi partai politik dibutuhkan secara baik dan benar. Beberapa fungsi dasar yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh partai," 2018.
- F. Arsil, M. Novrizal, R. M. Wasti, Y. Abiyoso, dan A. Abdillah, "PRAKTIK DEMOKRASI MODERN DALAM PEMERINTAHAN NAGARI DI MINANGKABAU," *Arena Hukum*, 2022.
- Setialaksana Nana & Randy Fadillah Gustaman, "Teori-Teori Dasar Pendidikan Kewarganegaraan," *Ciamis: Galuh Nurani*, 2018.

Copyright holder:

Miftahul Rohim, Linda Rahmawati, Arkan Raihan, & Saepul Rizki (2023)

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

